

**PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA
DPRD MELALUI OPTIMALISASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE
ACTION DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN**

Muhammad Alfian Prayitno
NPP. 30.1010

Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 30.1010@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Arwanto Harimas Ginting, S.STP, M.Si

ASBTRACT

***Problems/Background (GAP):** The author focuses on the problem. The current implementation of affirmative action policies has not achieved optimal results, due to the lack of representation of women in the legislature, especially in the City of Banjarmasin. **Objective:** The aim of this study is to determine the factors that influence the low representation of women and to obtain an overview of the strategies used to optimize affirmative action. **Method:** This study uses a qualitative approach and analysis of the theory of gender bias according to Mansour and the theory of representation according to Philips. Data collection techniques were carried out using semi-structured interviews (4 informants) and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are the limited number of qualified and qualified women in politics, the lack of support among women, the lack of experience in organizing, the influence of patriarchal culture, the assumption that women are responsible in the domestic sector, the lack of elite will political elites in opening opportunities for women's involvement and lack of coordination between groups in gender matters. The strategy used in optimizing affirmative action is by continuing to encourage women to join parties or community organizations, calling on political parties to involve women and empowering women. **Conclusion:** The low representation of women is influenced by two internal and external factors. Internal factors include the limited number of qualified and qualified women in politics, the lack of support among women, the lack of experience in organizing and external factors, namely the influence of patriarchal culture, the notion that women are responsible in the domestic sector, the lack of will of political elites to open up opportunities for women's involvement and lack of coordination between groups in gender matters. The strategy used in optimizing affirmative action is by continuing to encourage women to join parties or community organizations, calling on political parties to involve women and empowering women. In order to optimize affirmative action, it is suggested that the role of political parties be increased in affirmative action policies, affirming and renewing regulations based on the pattern of development of Indonesian society related to the 30% quota.*

Keywords: *Affirmative Action; Woman; Women's Representation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan Implementasi kebijakan *affirmative action* saat ini belum mencapai hasil yang optimal, dikarenakan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Kota Banjarmasin. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dan memperoleh gambaran mengenai strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan *affirmative action*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan analisis terhadap teori bias *gender* menurut Mansour serta teori keterwakilan menurut Philips. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (4 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terbatasnya jumlah perempuan yang berkualitas dan berkualifikasi mumpun di dalam politik, minimnya dukungan antar perempuan, minimnya pengalaman dalam berorganisasi, adanya pengaruh budaya patriarki, anggapan bahwa perempuan bertanggungjawab di sektor domestik, kurangnya kemauan elit-elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dan kurangnya koordinasi antar kelompok dalam urusan *gender*. Strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan *affirmative action* yaitu dengan terus mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat, menghimbau partai politik untuk melibatkan perempuan dan dengan melakukan pemberdayaan perempuan. **Kesimpulan:** Rendahnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah karena terbatasnya jumlah perempuan yang berkualitas dan berkualifikasi mumpun di dalam politik, minimnya dukungan antar perempuan, minimnya pengalaman dalam berorganisasi dan faktor eksternal yaitu pengaruh budaya patriaki, anggapan bahwa perempuan bertanggungjawab di sektor domestik, kurangnya kemauan elit-elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dan kurangnya koordinasi antar kelompok dalam urusan *gender*. Strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan *affirmative action* yaitu dengan terus mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat, menghimbau partai politik untuk melibatkan perempuan dan dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Guna mengoptimalkan *affirmative action* tersebut disarankan adanya peningkatan peran partai politik dalam kebijakan *affirmative action*, penegasan dan pembaharuan regulasi berdasarkan pola perkembangan masyarakat Indonesia terkait kuota 30%.

Kata kunci: *Affirmative Action*; Perempuan; Keterwakilan Perempuan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keadilan serta kesetaraan *gender* ialah masalah yang sangat sering didiskusikan tidak hanya dalam negeri tetapi secara internasional. Di Indonesia, belum tercapainya kesetaraan serta keadilan *gender mampu* terlihat dari kurangnya keterwakilan perempuan dalam ranah politik, terkhusus pada lembaga legislatif. Dibuktikan dengan adanya representasi perempuan yang ada di DPR yang mengalami penurunan sebesar 2,8% yang berawal dari 12% di tahun 1992 menjadi 9,2% di tahun 1999. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan pada bidang politik telah lama dilaksanakan di Indonesia. Tidak hanya saat sekarang, keterwakilan perempuan sudah ada pada zaman Orde Baru bahkan pada saat pemilu pertama kali yang dilaksanakan pada tahun 1955 menghasilkan sebanyak 272 anggota parlemen yang dimana 16 di antaranya ialah perempuan maupun sebesar (5,88%). Di masa Orde Baru, adanya pembatasan dalam peran perempuan di ranah politik khususnya menjadi anggota legislatif. Adanya anggota perempuan di parlemen pada saat masa Orde Baru itu bukanlah perempuan yang ada dikalangan biasa melainkan dari keluarga elite militer yang telah menguasai wilayah politik (Ekawati, 2017). Selain itu adanya aturan untuk memberikan kuota 30 persen bagi keterwakilan perempuan dalam dunia politik disebut dengan kebijakan *affirmative action*. Aturan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, serta Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan *affirmative action* adalah suatu tindakan afirmatif yang positif bertujuan guna memperbanyak keterwakilan perempuan serta kelompok minoritas pada bidang pendidikan, bisnis, serta pekerjaan, dengan proses seleksi maupun pemilihan yang berdasarkan jenis kelamin, ras, maupun etnis, tindakan afirmatif ini menyebabkan kontroversi yang intens (Sayuti, 2013). Kebijakan yang diberikan oleh *affirmative action* disini tidak selalu menimbulkan dampak perkembangan yang sangat terlihat kepada keterwakilan wanita dalam bidang politik. Faktanya menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia ialah negara yang dimana total populasi penduduknya pada pertengahan bulan Juli 2022 sebanyak 275,77 juta jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 135,57 juta jiwa yakni sebanyak 49,5%, dengan adanya data tersebut keterwakilan perempuan belum terealisasikan dengan optimal di lembaga legislatif. Dibuktikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia, hasil dari Pemilihan Umum tahun 2019 adanya keterwakilan wanita di Lembaga Legislatif Nasional dalam hal ini DPR-RI berjumlah sebanyak 120 anggota legislatif dari jumlah anggota DPR-RI sebanyak 575 anggota maupun berkisar sebesar 20,8 persen. Di Lembaga legislatif yang ada di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan juga merasakan hal yang sama. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat hasil dari pemilu terpilih anggota DPRD Kota Banjarmasin pada tahun 2009, 2014, dan 2019 berturut-turut adalah 13, 8, dan 11. Dengan adanya data tersebut dibuktikan angka keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kota Banjarmasin belum memenuhi kuota sebesar 30%. Mengingat total populasi perempuan menurut data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin pada tahun 2021 berjumlah 330.680 dari total 662.320 penduduk Kota Banjarmasin. Keadaan ini yang membuat kurang adanya keterwakilan perempuan disebabkan kebijakan *affirmative action* belum terealisasikan dengan optimal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada dua faktor yang membuat angka keterwakilan perempuan rendah diantaranya, faktor internal yakni perempuan belum tertarik terjun di dunia politik sebab mempunyai pemikiran bahwa politik ialah pekerjaan kotor serta faktor eksternal yakni proses pengambilan keputusan parpol acapkali abai atas kepentingan kaum perempuan (Andriana et al., 2012). Selain itu ada faktor lain yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yakni adanya budaya yang menganggap bahwa perempuan itu lemah serta lebih memosisikan perempuan sebagai IRT (Suryawati, 2020).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks yang sama yaitu politik gender dalam bentuk keterwakilan perempuan di dunia politik. Penelitian Helena Yolanda (2018) berjudul Politik serta Perempuan (Penerapan Affirmative Action dalam Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2019) menemukan bahwa Affirmative Action yang diberikan oleh PSI terhadap keterlibatan perempuan dalam pencalegan membuat partai tersebut menjadi jumlah caleg perempuan terbesar dibandingkan dengan partai yang lain yaitu sebesar 252 caleg perempuan. Penelitian Made Ananda Putri dan Ni Nyoman Sukerti (2020) dengan judul Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali menemukan bahwa terjadi peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali sebesar 16,1% tahun 2019 dan di periode sebelumnya tahun 2014 hanya mendapatkan 9,1%. Penelitian Anak Agung Dita Intan Pertiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya (2022) menemukan bahwa peran penting perempuan dalam politik praktis sebagai anggota dewan yaitu membantu untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan perancangan undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu perempuan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan tema yang sama dari penelitian tersebut yaitu politik gender dalam bentuk keterwakilan perempuan di dunia politik, peneliti lebih menekankan penelitian ini pada optimalisasi kebijakan yang ada yaitu kebijakan affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kota Banjarmasin. Optimalisasi affirmative action ini perlu dilakukan guna mewujudkan representasi perempuan di lembaga legislatif Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini juga berbeda dari peneliti-peneliti tersebut di atas, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan alat analisis berupa Wawancara dan Dokumentasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kota Banjarmasin dan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi dalam mengoptimalkan *affirmative action* guna meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kota Banjarmasin

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Menurut Gulo (2002), metode deskriptif diartikan sebagai suatu cara dalam melaksanakan penelitian kepada status kelompok orang, objek, maupun peristiwa yang ada di masa sekarang. Menurut Nazir (2011:346) mengatakan bahwa analisis data memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu

pengetahuan karena melalui analisis tersebut, data dapat diberi arti dan makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisis data menggunakan tiga tahap analisis seperti, Reduksi Data menurut Miles & Huberman (1994:16) mengartikan reduksi data sebagai sebuah proses yang meliputi pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang didapatkan dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama melakukan penelitian yang berorientasi kualitatif dan pengumpulan data, serta dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis dalam melanjutkan pengumpulan data selanjutnya atau mencari data yang dibutuhkan. Selanjutnya Penyajian Data (*Display Data*) bertujuan untuk mengorganisir data yang diperoleh dan menyajikannya dalam pola hubungan tertentu, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang data yang diambil dari lokasi magang. Menurut Ulber Silalahi, dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. Penyajian data seringkali dilakukan dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dan yang terakhir adalah Penarikan Kesimpulan, yaitu temuan yang sifatnya menggambarkan permasalahan yang ada pada suatu objek. Menarik kesimpulan ialah langkah akhir dari analisis data. Dalam hal ini data yang didapat sebelumnya pada saat penyajian data, serta penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan wawancara dokumentasi yang sudah. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara semi terstruktur terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Kota Banjarmasin (1 orang), Sekretaris KPU Kota Banjarmasin (1 orang), Anggota legislatif perempuan Kota Banjarmasin (2 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori bias gender menurut Mansour (2016) yang terdiri dari marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban kerja serta teori keterwakilan menurut Philips dalam (Yunika et al., 2019) yang terdiri dari *politic of idea* dan *politic of presence*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu yang pertama teori bias gender menurut Mansour (2016) sebagai *grand theory* dengan fokus analisis yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban kerja yang tidak seimbang. Teori yang kedua yaitu teori keterwakilan menurut Phillips (1997) dengan fokus analisis yaitu *politics of idea* dan *politics of presence*. Teori bias gender dan teori keterwakilan tersebut digunakan untuk menganalisis optimalisasi *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Banjarmasin. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Marginalisasi

Penulis menganalisis optimalisasi *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dilihat dari sikap yang ditunjukkan kepada perempuan dari segi peraturan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Di Kota Banjarmasin itu sendiri, berbagai macam fasilitas pemberdayaan perempuan telah disediakan. Salah satunya yaitu GOW atau Gabungan Organisasi Wanita. Namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM GOW ini masih belum berjalan optimal. Selain itu, belum ada fasilitas yang disediakan khusus untuk perempuan di Kota Banjarmasin dalam mempelajari berbagai hal tentang politik.

3.2. Subordinasi

Penulis melakukan analisis berdasarkan ada tidaknya diskriminasi dalam beberapa hal yang dialami perempuan, terutama dilihat dari pendidikan. Diskriminasi ini terbentuk karena adanya beberapa kendala sehingga timbul situasi untuk mengutamakan pendidikan anak laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, adanya GOW merupakan fasilitas yang masih belum berjalan dengan optimal. Selain itu belum adanya fasilitas khusus yang disediakan dimensi subordinasi dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Banjarmasin erat kaitannya dengan minimnya pendidikan politik yang ditempuh oleh perempuan di Kota Banjarmasin.

3.3. Stereotype

Penulis menganalisis rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Banjarmasin melalui penilaian terhadap hasil kerja perempuan di sektor publik. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota legislatif perempuan Kota Banjarmasin, dimensi stereotype dalam keterwakilan perempuan ini dapat dilihat dari kurangnya apresiasi terhadap perempuan yang bekerja di ranah politik. Salah satu penyebab timbulnya stereotype negatif terhadap perempuan yang menjadi anggota legislatif yaitu setelah dipilih dan menjabat di DPRD, hanya sebagai penonton atau tidak ikut bersuara. Sehingga ini menimbulkan opini publik bahwa perempuan rata-rata hanya sebagai pelengkap suatu kebijakan yang dibuat pemerintah.

3.4. Kekerasan

Kekerasan ditempatkan kedalam hubungan kedudukan, dimana laki-laki sebagai pihak yang (lebih kuat secara fisik) lebih tinggi dari pada perempuan (yang secara fisik lebih lemah). Sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena kekuasaan dan stereotype gender yang dilabelkan pada perempuan. Pada perempuan, dimensi kekerasan dalam keterwakilan ini terlihat dari peran gender yang membedakan karakter perempuan dan laki-laki dimana perempuan dianggap feminine dan laki-laki disangka maskulin. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota legislatif perempuan Kota Banjarmasin kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada beberapa fungsi tambahan yang membuat perempuan harus siap dalam segala kemungkinan dalam dunia politik. Dimensi kekerasan di Kota Banjarmasin masih terjadi terbukti dengan sebagian perempuan mendapatkan tugas dan fungsi lebih dan juga sering dimanfaatkan oleh partai politik demi membuat partai politik tersebut lolos.

3.5. Beban kerja yang tidak seimbang

Penulis menganalisis rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Banjarmasin melalui budaya dan tradisi dari peran gender perempuan untuk bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan di sektor domestik. Sehingga beban kerja yang ditanggung perempuan akan lebih besar dari laki-laki, apabila perempuan juga melakukan pekerjaan di sektor publik. Berbagai macam permasalahan yang termasuk kedalam beban kerja yang tidak seimbang ini, salah satunya adalah tradisi dan adat istiadat yang telah berakar di tengah-tengah masyarakat. Tradisi yang dimaksud adalah kodrat utama perempuan yang menjadi penanggung jawab berbagai pekerjaan didalam rumah. Pekerjaan yang menjadikan perempuan yang bekerja di sektor publik memiliki tanggung jawab dan beban yang lebih besar. Berikut tabel yang menunjukkan status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kota Banjarmasin,

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja selamaseminggu menurut Status Pekerjaan Utama serta Jenis Kelamin di Kota Banjarmasin Tahun 2022

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah /Total
1	Berusaha Sendiri	42.923	37.651	80.574
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	13.699	8.508	22.207
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	8.383	3.440	11.823
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	113.512	60.206	173.718
5	Pekerja Keluarga/Tak dibayar	5.250	15.400	20.650

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, perempuan yang bekerja di keluarga/tanpa dibayar memiliki total perbandingan yang lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian laki-laki yang bekerja di sektor publik memiliki perbandingan yang lebih besar dari perempuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan di sektor domestik masih menjadi tanggung jawab perempuan, dan perempuan yang bekerja di sektor publik hanya sebagai pencari nafkah tambahan.

3.6. Politic of idea (politik ide)

Menganalisis keterwakilan perempuan melalui Politic of idea (politik ide) yaitu dengan menjelaskan bentuk keterwakilan yang terjadi apabila keberadaan wakil politik dikarenakan adanya pengusulan gagasan dan pendapat dari orang-orang yang diwakilkan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, anggota legislatif di Kota Banjarmasin dipilih berdasarkan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara yang diberikan masyarakat kepada setiap calon yang berhasil menang dalam Pemilihan umum anggota legislatif Kota Banjarmasin pada tahun 2019, yaitu sebanyak 45 orang yang memperoleh suara terbanyak merupakan calon yang mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tugas dan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Banjarmasin.

3.7. Politics of presence (politik kehadiran)

Menganalisis keterwakilan perempuan melalui Politics of presence (politik kehadiran), yaitu dengan menjelaskan tentang keterwakilan politik yang timbul dengan menyesuaikan keberadaan kelompok-kelompok di masyarakat agar kebutuhan dan kepentingan setiap kelompok dapat tersalurkan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris KPU pada Jumat, 13 Januari 2022, mengemukakan bahwa : Proses pencalonan oleh partai politik yang duduk di DPRD adalah yang dipilih oleh masyarakat yang artinya mereka duduk disana karena adanya kepercayaan dari masyarakat tidak ada kaitannya dengan kepentingan partai politik. jadi saya rasa jika kepentingan partai ataupun pemerintah daerah akan sulit terakomodir dengan mekanisme dari pemilu yang kita laksanakan sekarang ini. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini formasi jabatan pada anggota legislatif khususnya di Kota Banjarmasin diisi berdasarkan kepentingan masyarakat dan bukan berdasarkan keberadaan kelompok-kelompok yang diwakilkan. Politik of presence khususnya di Kota Banjarmasin belum diterapkan, sehingga terdapat berbagai kepentingan masyarakat belum bisa terpenuhi seperti kebutuhan yang berkaitan dengan lingkup masalah perempuan

dan anak. Hal ini dikarenakan keberadaan perempuan sebanyak 49,01% yang merupakan salah satu contoh kelompok dalam masyarakat belum terwakilkan di DPRD Kota Banjarmasin.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Optimalisasi affirmative action termasuk kedalam politik gender dalam bentuk keterwakilan perempuan di dunia politik. Kota Banjarmasin termasuk kedalam salah satu Kota yang memiliki permasalahan tentang rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Penulis menemukan temuan penting yakni kurangnya apresiasi terhadap perempuan yang bekerja di ranah politik. Salah satu penyebab timbulnya stereotype negatif terhadap perempuan yang menjadi anggota legislatif yaitu setelah dipilih dan menjabat di DPRD, hanya sebagai penonton atau tidak ikut bersuara. Sehingga ini menimbulkan opini publik bahwa perempuan rata-rata hanya sebagai pelengkap suatu kebijakan yang dibuat pemerintah. Berbeda dengan yang ditemukan oleh Penelitian Helena Yolanda (2018) dimana Affirmative Action yang diberikan oleh PSI terhadap keterlibatan perempuan dalam pencalegan membuat partai tersebut menjadi partai dengan jumlah caleg perempuan terbesar dibandingkan dengan partai politik lainnya dengan total 252 caleg perempuan dalam pemilihan umum tahun 2019. Rendahnya keterwakilan perempuan juga dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat yang telah berakar di tengah-tengah masyarakat Kota Banjarmasin dimana masyarakat masih menganggap bahwa pekerjaan di Sektor domestik merupakan tanggung jawab perempuan. Pekerjaan yang menjadikan perempuan yang bekerja di sektor publik memiliki tanggung jawab dan beban yang lebih besar. Hal ini berbeda dengan penelitian Made Ananda Putri dan Ni Nyoman Sukerti (2020) yang berfokus pada meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali pada tahun 2019 sebesar 16,1% dibanding tahun 2014 sebesar 9,1% selain itu budaya patriarki di Bali sangat berpengaruh pada rendahnya angka keterwakilan perempuan yang ada. Penelitian Anak Agung Dita Intan Pertiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya (2022) peneliti terdahulu lebih fokus kepada pengaturan politik praktik anggota DPR lewat Pemilu serta mencari tahu kedudukan wanita di politik praktis pada anggota DPR lewat pemilu sebagai wujud dari Affirmative Action.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat optimalisasi affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Banjarmasin, yakni: (a) Perempuan yg mencalonkan diri masih belum dikenal oleh masyarakat; (b) Dukungan dari sesama perempuan masih kurang; (c) Pendidikan politik bagi perempuan yang di usungkan belum berjalan optimal (beberapa partai hanya menjadikan perempuan sebagai alat kelengkapan data)

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa: (a) Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif di Kota Banjarmasin adalah faktor Internal, yaitu jumlah perempuan yang terbatas secara kualitas dan kualifikasi dalam memenuhi ketentuan politik yang dapat dilihat dari rendahnya pendidikan politik serta rendahnya daya saing dimiliki antara laki-laki dan perempuan, kurangnya dukungan antar sesama perempuan dibuktikan dari adanya kepercayaan publik yang masih kurang terhadap perempuan dan masih lebih mempercayai laki-laki serta faktor eksternal, yaitu budaya yang ada di masyarakat Kota Banjarmasin, mayoritas merupakan suku Banjar yang masih menganggap laki-laki sebagai pemimpin dan mencakup budaya patriarki yang masih kuat.

Terdapat persepsi bahwa perempuan bertanggung jawab dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga, kurangnya dukungan dari elit politik untuk melibatkan perempuan dalam politik, dan kurangnya koordinasi antar kelompok yang memperjuangkan isu kesetaraan *gender*. (b) Strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kota Banjarmasin yaitu mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat sejak dini; pemberdayaan perempuan; dan keharusan bagi partai politik untuk melibatkan perempuan;

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya menggunakan tiga tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Mengoptimalkan *Affirmative Action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kota Banjarmasin untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada lembaga legislatif Kota Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak baik dari KPU Kota Banjarmasin maupun masyarakat yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). *Menara Riau*, 12(1), 41–47.
- Andriana, N., Nuraini Siregar, S., Haris, S., Yanuarti, S., Putri, B., & Sandra Amalia, L. (2012). Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. In S. N. Siregar (Ed.), *PT. Gading IntiPrima*.
- Suryawati, N. (2020). Hak Asasi Politik Perempuan (A. R. Yuhelson(ed.)).
- Yolanda, H. (2018). Politik dan Perempuan (Penerapan Affirmative Action dalam Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2019).
- Putri, M. A., & Sukerti, N. N. (2020). Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan di Dprd Provinsi Bali. 8(5), 1–11.
- Pertiwi, Budiarta, & Sudibya. (2022). Implikasi Kebijakan Affirmative Action Dalam Penentuan Quota Wanita Sebagai Calon Anggota Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perwujudan Kesetaraan Gender Di Indonesia. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 3(3), 493–498. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5313.493-498>
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nazir, M. F & Rehman, A. (2011). *Metodologi Penelitian*. PT

Miles, Michael Huberman, Matthew B.(1994) *Qualitative Data Analysis: An expanded Sourcebook*.

Yunika, A., Putri, I. A., & Asrinaldi. (2019). *Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan (Studi Kasus: Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019)*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 417–427.

